

HANDOUT MATAKULIAH: PROPAGANDA

PRODI: ILMU KOMUNIKASI FISIP UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Semester: Genap 2010/2011

Pertemuan 10

PROPAGANDA POLITIK di INDONESIA ¹

Oleh: Kamaruddin Hasan²

Propaganda Era Abdurrahman Wahid

Duet Gus Dur-Megawati dipilih setelah dilaksanakan SU MPR bulan Oktober 1999. Propaganda era Gus Dur sebenarnya akumulasi pemikiran dan orientasi politiknya di masa lalu. Tingkah lakunya di samping memunculkan silang pendapat telah memancing lembaga tinggi lain untuk “berdaya”. Berikut dinamika propaganda Gus Dur;

1. *Menggunakan language politik untuk propaganda*

Saat ini, kondisi masyarakat baru mencapai titik kulminasi “emosi”. Kondisi demikian akan mudah memunculkan “perang fisik” karena manifestasi kejengkelan, ketidakpuasan, ingin segala persoalan diselesaikan dengan segera. Oleh karena itu, tak ada pilihan lain bahwa “musuh-musuh” politik itu harus dilawan dengan politik bahasa sebagai kekuatan simbolik. Maka dengan entengnya Gus Dur menanggapi dengan ringan berbagai kritik dan sindiran yang ditujukan kepadanya, ‘*Gitu aja kok repot*’. Politik bahasa Gus Dur dalam sebuah negara plural seperti Indonesia mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah ia bisa memperkuat posisi legitimasinya. Namun begitu, sikap cuek dan pernyataan keontroversial tersebut menyimpan sebuah “bara api” yang setiap saat bisa meledak menjadi kerusuhan.

2. *Mempropagandakan Fiqh politik*

Lebih khusus lagi, perlu mengetahui *fiqh siyasah* (fiqh politik) presiden ke-4 Indonesia tersebut. Fiqh siyasah Gus Dur yang *pertama, dar’u al mafaasid muqadam ‘ala jalb almashaalih* (mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencari kebaikan) (Wahid, 1997). *Kedua, ma layatimmul wajibu illa bihi fahua wajibun* (sesuatu yang menyempurnakan kewajiban berstatus wajib pula) (Wahid,

¹ Diambil dari berbagai sumber

² Dosen prodi ilmu komunikasi Fisip Unimal

1997). Pemikiran Gus Dur seperti itu meskipun positif di masa datang namun ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan: *Pertama*, kalau Gus Dur tetap ngotot pada prinsipnya, suatu saat nanti ia akan berjalan sendiri dengan ide-idenya. *Kedua*, Gus Dur harus mengurangi *self confidence* yang berlebihan. Agar tak dikucilkan di depan publik, ia sedikit mengalah untuk memperhatikan suara lain (misalnya DPR atau MPR).

3. *Kesejahteraan dan demokrasi sama-sama penting*

Dalam setiap pertemuan dengan kepala pemerintahan atau kepala negara lain di luar negeri beberapa waktu lalu, presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selalu mengatakan, “*proses demokratisasi memerlukan kesejahteraan*”. Dan tentunya, kesejahteraan ini membutuhkan lapangan kerja dan lapangan kerja akan tercipta jika ada investasi baru, demikian penegasan Gus Dur. Pendapat demikian sangat relevan dengan ungkapan, “memperjuangkan demokrasi tidak akan tercapai manakala perut sedang kosong”. Oleh karena itu mendudukan keduanya sejajar dan sebagai variabel saling mempengaruhi adalah pilihan yang bijak. Maka Gus Dur tidak gegabah dengan mengatakan bahwa kesejahteraan menjadi faktor terbentuknya demokrasi, tetapi *demokrasi memerlukan kesejahteraan*.

4. *Propaganda Tap MPRS no. XXV/MPRS/1966*

Meskipun Gus Dur tetap setuju untuk mencabut Tap MPRS no. XXV/MPRS/1966 yang berisi larangan ajaran komunis/marxisme-leninisme di Indonesia, tanggapan kontra pun bermunculan di tengah masyarakat. Salah satu alasan kenapa Tap MPRS itu perlu dicabut adalah karena paham komunisme sudah banyak yang menelan “kurban” manusia tak terbilang. Maka usulan dicabutnya Tap MPRS tersebut adalah konsekuensi dari demokrasi. Dalam demokrasi ada penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM). Apapun bentuknya, kalau sudah menyangkut HAM dengan konsekuensi apa pun harus ditegakkan. Ini memang “bayaran mahal” pelaksanaan demokrasi.

5. *Propaganda negara tanpa “tentara”*

Dasar pemikirannya adalah hanya militerlah yang mempunyai daya paksa dan kekuatan tempur yang handal. Dalam militer juga diakui ada hierarki kekuasaan serta disiplin tinggi yang diterapkan sehingga dengan cepat dan mudah mengatasi semua persoalan negara. Ini pulalah yang mendasari kenapa tentara atau militer menjadi tulang punggung dalam mengatasi stabilitas yang rentan tersebut. Tanpa mengecilkan peran militer, pemerintahan yang dikelola tentara bisanya tidak membuahkan iklim demokratisasi yang baik. Dengan kata lain pula, suasana egaliter, tanpa rasa takut (*freedom from fear*) sangat sulit diwujudkan dalam pemerintahan militer. Inilah sebenarnya alasan rasional untuk memahami segala sepak terjang presiden Gus Dur dengan mengangkat supremasi sipil atau militer di Indonesia.

6. *Propaganda politik memaafkan*

Dalam pertemuan antar presiden Habibie dengan beberapa pimpinan parpol, ada satu usulan yang sangat menarik dari Gus Dur agar penyelesaian kasus Soeharto diselesaikan secara Islam (*fiqh*). Ketentuan hukum Islam yang dikemukakan ketua umum PBNU itu adalah dengan mengampuni Soeharto sambil menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada komisi independen dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat. *Toh* menurutnya, walaupun akan diusut secara hukum formal sulit dibuktikan. Namun begitu, tanpa ada syak wasangka untuk konteks Soeharto, keuntungan yang terasa jika diterapkan *Fiqh* Islam adalah menghindari politik “balas dendam”. Sebab, tidak mungkin keluarga Soeharto akan tinggal diam melihat bapaknya diadili sebegitu rupa, sama persis ketika Soeharto memperlakukan tidak adil Soekarno.

7. *Propaganda demokrasi dengan teologi inklusifisme*

Saat ini, satu-satu pembaruan pemikiran yang terus perlu dilakukan adalah pendapat akan pentingnya kerukunan umat beragama sebagai pilar untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Salah satu dasar pemikiran perlunya diwujudkan teologi ini adalah bangsa Indonesia masih menyimpan pluralisme yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan friksi dan konflik horizontal.

Oleh karena itu, satu hal pokok yang harus dilakukan adalah pembaruan pemikiran akan pentingnya sikap hidup terbuka, toleran, inklusif sebagai salah satu syarat awal pembentukan kesatuan masyarakat. Teologi inklusifisme juga disebut “teologi kerukunan beragama”, baik dalam satu agama atau agama lain. Tema sentralnya adalah pengembangan paham dan kehidupan keagamaan yang inklusif, toleran, dan respek terhadap pluralisme keagamaan. Sehingga berbagai penganut aliran keagamaan atau agama-agama dapat hidup berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*).

=====